



PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, TRANSPARANSI, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (STUDIEMPIRIS PADA PEMERINTAHAN DESA DI KEKAMATAN SITELLUTALI URANG JEHE KABUPATEN PAKPAK BHARAT)

Rosi Magdalena Berutu¹, Azizul Kholis² dan Esa Setiana³

¹Azizulkholis1@gmail.com,

²esasetiana@unimed.ac.id

¹²³ Universitas Negeri Medan

Article Info

Article history:

Received Jun 11th, 2025

Revised Aug 19th, 2025

Accepted Aug 26th, 2025

Kata Kunci:

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Peran Perangkat Desa, Transparansi, Partisipasi Masyarakat

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perangkat desa di kecamatan sitellu tali urang jehe yang terdiri dari 10 desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh dengan sampel sebanyak 60 responden. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebar kepada kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum, kasi kesejahteraan dan pelayanan, dan kasi pemerintahan. Teknik analisis data yaitu analisis statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis menggunakan *software* SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan nilai sig-t $0,003 < 0,05$. Transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, dengan nilai sig-t $0,818 > 0,05$. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan nilai sig-t $0,000 < 0,05$. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

ABSTARCT

This research aims to determine the influence of the role of village officials on the accountability of village fund management, the influence of transparency on the accountability of village fund management, the influence of community participation on the accountability of village fund management. The population in this study was all village officials in Sitellu Tali Urang Jehe District, which consists of 10 villages. The sampling technique used saturated sampling with a sample size of 60 respondents. The data collection technique uses a questionnaire distributed to village heads, village secretaries, heads of finance, heads of general affairs, heads of welfare and services, and heads of

government. The data analysis techniques used are descriptive statistical analysis, validity and reliability testing, classical assumption testing, multiple linear regression analysis and hypothesis testing using SPSS 25 software. The research results show that the role of village officials has a positive effect on the accountability of village fund management with a sig-t value of $0.003 < 0.05$. Transparency has no effect on Village Fund Management Accountability, with a sig-t value of $0.818 > 0.05$. Community participation has a positive effect on Village Fund Management Accountability with a sig-t value of $0.000 < 0.05$. The conclusion of this research is that the role of village officials influences the accountability of village fund management, transparency does not influence the accountability of village fund management, community participation influences the accountability of village fund management.



© 2025 Para Penulis. Diterbitkan oleh Perkumpulan Konsultan Manajemen Pendidikan Indonesia (PKMPI). Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-SA (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Rosi Magdalena Berutu¹, Azizul Kholis² dan Esa Setiana³
Universitas Negeri Medan
Email: ¹Azizulkholis1@gmail.com, ²esasetiana@unimed.ac.id

Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan menjadi instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara dari pusat hingga desa. Berdasarkan PMK No. 231/PMK.05/2022 Pasal 1 Ayat 1, pemerintah pusat hingga pemerintahan desa diwajibkan mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai kerangka akuntansi publik yang akrual dan transparan. Desa, sesuai UU No. 6 Tahun 2014, diakui sebagai entitas hukum yang memiliki otonomi mengelola urusan pemerintahan lokal berdasarkan hak asal-usul, inisiatif masyarakat, serta norma tradisional yang dilindungi oleh sistem negara. Dana desa yang bersumber dari APBN disalurkan atas dasar transfer melalui APBD kabupaten/kota (PMK No. 193/PMK.07/2018), dan dirancang untuk membiayai fungsi pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat desa dalam kerangka otonomi dan akuntabilitas pemerintahan lokal.

Di Kabupaten Pakpak Bharat, Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2024 menetapkan pagu dana desa tahun 2024 sebesar Rp 40,05 miliar yang dibagi ke delapan kecamatan berdasarkan skema alokasi dasar, formula, afirmasi, dan kinerja. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe menerima alokasi tertinggi (Rp 7,96 miliar), lalu dibagi ke sepuluh desa. Desa Tanjung Meriah mendapat pagu terbesar (Rp 1,05 miliar), sementara Desa Simberuna menerima paling sedikit (Rp 683 juta), yang mencerminkan variabilitas kebutuhan penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tantangan geografis.

Meskipun distribusi dana desa dirancang untuk mendukung pembangunan yang inklusif, praktik di lapangan menunjukkan berbagai kendala terhadap akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Data lapangan menyebut adanya penyimpangan pengeluaran yang tidak sesuai rencana, sarana transparansi seperti papan informasi desa masih minim atau tidak tersedia. Partisipasi masyarakat juga masih rendah, misalnya Desa Tanjung Mulia lebih memilih bantuan seng padahal jalan yang rusak parah lebih prioritas. Kasus tersebut menunjukkan kegagalan dalam proses perencanaan, penetapan prioritas, dan keterlibatan warga, menimbulkan ketidaktepatan tujuan pembangunan desa.

Hasil riset sebelumnya memperlihatkan bahwa faktor-faktor seperti transparansi dan partisipasi masyarakat sering terkait positif dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Misalnya, Putra & Rasmini (2019) serta penelitian Rahmayanti & Chrystiana, Susanti et al.

(2023) dan Mukmin & Maemunah (2018) menunjukkan pengaruh positif signifikan. Di sisi lain penelitian Ma'mun (2023) dan Khasanah (2020) melaporkan bahwa variabel ini tidak selalu berpengaruh signifikan—ini mengindikasikan inkonsistensi dalam implementasi di lapangan.

Selain itu, penelitian yang lebih spesifik menyoroti **peran perangkat desa** sebagai faktor penting. Studi di Kecamatan Sukawati (Pebriyanto & Sumadi, 2021) dan Yogyakarta (Nurjanah, 2019) menemukan bahwa kompetensi dan peran perangkat desa berkontribusi signifikan terhadap akuntabilitas dana desa. Penelitian di Kota Bangun III (Samarinda) juga mencatat bahwa perangkat desa aktif dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan, meskipun ada keterbatasan pengetahuan teknis. Studi lain di Wonosobo, Pekalongan, dan Semarang menunjukkan bahwa meskipun perangkat desa umumnya menjalankan tugas sesuai bidangnya, peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan masih diperlukan untuk memastikan akuntabilitas berjalan efektif. Di Kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang, ditemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif, namun peran perangkat desa tidak selalu signifikan—menunjukkan variabilitas pengaruh di berbagai daerah.

Dengan melihat adanya inkonsistensi hasil penelitian serta kontribusi penting peran perangkat desa, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti ulang pengaruh **peran perangkat desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat** terhadap **akuntabilitas pengelolaan dana desa** di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, Kabupaten Pakpak Bharat. Penambahan variabel peran perangkat desa diharapkan membantu menjelaskan secara lebih komprehensif determinan akuntabilitas, sekaligus melengkapi literatur sebelumnya dan menangkap dinamika lokal yang mungkin berbeda dari penelitian lain.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yaitu data primer. Data yang diperoleh dengan menggunakan angket atau kuisioner yang disebar oleh peneliti untuk dijawab oleh perangkat desa yang pemilihannya di 10 desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe. Kuisioner terbagi atas dua bagian, dimana bagian pertama berisi pernyataan terkait data demografi responden, dan pernyataan kedua mengenai variabel-variabel terkait pada penelitian ini.

Kuisioner yang disebar peneliti diisi langsung oleh aparat desa yang ada di seluruh desa sekecamatan Sitellu Tali Urang Jehe, kuisioner berisikan daftar pernyataan singkat yang diajukan kepada responden untuk diisi sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Dimana setiap butir pernyataan kuisioner menggunakan skala likert lima point antara lain: (1) Sangat Tidak Setuju, (2) Tidak Setuju, (3) Netral, (4) Setuju, (5) Sangat Setuju.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pakpak Bharat, dengan luas wilayah 473,25 Km². Dengan kepadatan penduduk mencapai 21,73 jiwa. Secara geografis, Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe terletak pada garis 2,250 - 2,450 Lintang Utara, dan 960 - 970 Bujur Timur. Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Dairi Sebelah Barat : Kota Subulusallam Sebelah

Selatan : Kecamatan Salak Sebelah Timur : Kecamatan Kerajaan

2. Deskripsi Responden

Dalam studi ini, responden menunjukkan keberagaman yang cukup signifikan dari segi pengalaman kerja, yang memberikan gambaran kontekstual penting atas sudut pandang mereka dalam penelitian. Mayoritas responden, yakni 65% atau sekitar 39 orang, memiliki pengalaman kerja antara 1 hingga 5 tahun. Kelompok ini dapat dianggap relatif baru memasuki dunia kerja, namun cukup akrab dengan praktik administratif dan operasional di pemerintahan desa. Selanjutnya, sekitar 25% (sekitar 15 orang) telah berkecimpung selama 6 hingga 10 tahun, menggambarkan kelompok yang lebih stabil dan berpengalaman dalam lingkungan kerja pemerintahan desa. Sisanya, sekitar 10% (sekitar 6 orang), memiliki pengalaman kerja lebih dari 10 tahun, yang menunjukkan keterlibatan jangka panjang dan kemungkinan memperlihatkan perspektif ketua aparat desa atau perangkat yang lebih senior.

Deskripsi demografis ini mempertebal pemahaman mengenai representativitas sampel dalam penelitian, di mana distribusi pengalaman kerja mencerminkan variasi kapasitas serta perspektif responden—dari pemula hingga tokoh berpengalaman. Informasi seperti ini esensial sebagai bagian dari statistik deskriptif untuk memperjelas siapa saja yang menjadi subjek penelitian dan bagaimana hasilnya dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Selain menunjukkan heterogenitas sampel, distribusi pengalaman kerja juga menjadi indikator potensi bias hasil—misalnya, responden yang lebih berpengalaman mungkin memberikan jawaban yang lebih reflektif atau kritis terhadap praktik tata kelola keuangan desa dan mempertimbangkan informasi yang diperoleh selama bertahun-tahun.

Dengan demikian, karakteristik responden yang tercermin melalui kelompok pengalaman kerja ini memberikan konteks penting terhadap hasil penelitian. Perbedaan pengalaman kerja ini memengaruhi bagaimana responden memahami, menafsirkan, dan menyampaikan pandangannya, yang selanjutnya menjadi kunci untuk memvalidasi temuan dan mempertimbangkan limitasi studi dalam mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Hasil Karakteristik Responden

Tabel 4. 2
Data Demografi Responden

	Keterangan	Frekuensi	Persentase(%)
Jenis Kelamin	Laki – laki	50	83,3
	Perempuan	10	16,7
Usia	20 – 30	17	28,2
	31 – 40	28	46,8

	41 – 50	10	16,6
	> 50	5	8,4
Pendidikan Terakhir	SMA/SMK	51	85
	D3	0	0
	S1	9	15
	S2	0	0
Jabatan	Kepala Desa	10	16,7
	Sekertaris Desa	10	16,7
	Kaur Keuangan	10	16,7
	Kaur Umum	10	16,7
	Kasi Kesejahteraan	10	16,7
	Kasi Pemerintahan	10	16,7
Masa Kerja	1 - 5 Tahun	39	65
	6 - 10 Tahun	15	25
	> 10 Tahun	6	10

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Analisis statistik deskriptif pada Tabel 4.3 menyajikan wawasan utama mengenai variabel yang diteliti:

Variabel peran perangkat desa (X1) berkisar antara nilai minimum 24,00 hingga maksimum 49,00, dengan nilai rata-rata 37,68. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perangkat desa dinilai aktif dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa. Variabel transparansi (X2) berkisar antara minimum 25,00 hingga maksimum 48,00, dengan nilai rata-rata 36,68. Responden merasakan tingkat transparansi yang bervariasi dalam pengelolaan dana desa, meskipun masih terdapat beberapa variasi dalam persepsi derajat transparansi.

4. Hasil Uji Kualitas Data
 - a. Hasil Uji Validitas

Tabel 4. 4
Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Item Pernyataan	Person Correlation (Rhitung)	Rtabel	Keterangan
Y1	0,535	0,254	Valid
Y2	0,621	0,254	Valid
Y3	0,748	0,254	Valid
Y4	0,592	0,254	Valid
Y5	0,473	0,254	Valid
Y6	0,534	0,254	Valid
Y7	0,807	0,254	Valid

Y8	0,331	0,254	Valid
Y9	0,740	0,254	Valid
Y10	0,624	0,254	Valid

Sumber: Data yang diolah, 2025

Uji validitas dalam penelitian ini membandingkan skor hitung (nilai-r) dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 0,05 (5%). Derajat kebebasan (df) dihitung sebagai ukuran sampel dikurangi dua ($df = n-2$), yang dalam hal ini adalah 60 responden. Alat ukur suatu pernyataan dianggap valid jika skor hitung lebih besar daripada nilai tabel.

Hasil uji validitas untuk setiap variabel dependen dan independen sangat penting untuk pengujian dan analisis lebih lanjut dalam penelitian. Validitas dinilai dengan membandingkan skor terhitung dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5%.

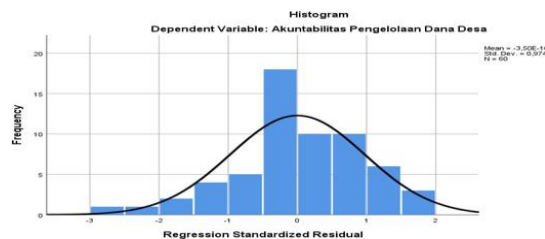
Dengan 60 responden, uji validitas membantu memastikan keandalan dan kepercayaan terhadap pengukuran penelitian.

b. Uji Realibitas

Para peneliti melakukan uji reliabilitas untuk menilai konsistensi responden dalam menjawab pernyataan dalam kuesioner. Suatu konstruk dianggap reliabel jika skor Cronbach's Alpha > 0,60. Hasil uji reliabilitas untuk variabel independen dan dependen disajikan pada Tabel 4.8. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

5. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Normalitas



Gambar
Histogram Uji Normalitas

Pada gambar 4.2 memperlihatkan bahwasanya bentuk grafik persebaran data membentuk kurva lonceng, yang berarti data berdistribusi dengan normal karena karekteristik data mengikuti pola distribusi normal

b. Hasil Uji Multikolineritas

Tabel 4. 10
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Peran Perangkat Desa	0,484	2,064
Transparansi	0,257	3,887
Partisipasi Masyarakat	0,260	3,853

a. Dependent Variable : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Hasil dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai variabel peran perangkat desa memperoleh nilai tolerance sebesar 0,484, nilai tolerance transparansi sebesar 0,257, dan nilai tolerance partisipasi masyarakat sebesar 0,260. Dimana nilai *tolerance* dari ketiga variabel tersebut lebih besar $> 0,10$. Selanjutnya untuk nilai VIF masing-masing variabel peran perangkat desa sebesar 2,064, transparansi memperoleh nilai VIF sebesar 3,887, dan partisipasi masyarakat memperoleh nilai VIF sekitar 3,853. Dimana nilai VIF dari ketiga peubah tersebut lebih kecil dari < 10 . Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

c. Hasil uji heteroskedastisitas

Tabel 4. 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	B	Std Error	Beta	t	sig
1 (constant)	-,686	1,884		-,364	,717
Peran Perangkat Desa	,065	,064	,188	1,025	,310
Transparansi	-,073	,094	-,196	-,780	,439
Partisipasi Masyarakat	,102	,088	,291	1,161	,250

a. Dependent Variable: ABS

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel $X_1 = 310 > 0,05$, $X_2 = 439 > 0,05$, dan $X_3 = 250 > 0,05$. sehingga dapat disimpulkan setiap variabel independen bebas dari heteroskedastisitas

6. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berangkat dari model regresi yang telah diestimasi, diperoleh konstanta (a) sebesar 16,076. Nilai ini memproyeksikan bahwa jika semua variabel independen (X_1 , X_2 , dan X_3) diasumsikan bernilai nol, maka variabel dependen (Y) akan berada pada titik awal 16,076—yang merepresentasikan nilai dasar Y tanpa pengaruh koefisien regresi X_1 —yang mewakili peran perangkat desa—adalah 0,329. Koefisien positif ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu unit skor/peran perangkat desa diasosiasikan dengan peningkatan rata-rata Y sebesar 0,329, dengan variabel lain tetap (*ceteris paribus*)

Berbeda dengan itu, koefisien X_2 (transparansi) tercatat negatif, yaitu $-0,036$. Artinya, peningkatan satu unit pada tingkat transparansi justru diikuti penurunan rata-rata Y sebesar 0,036, dengan variabel lainnya masih konstan. Koefisien negatif seperti ini menunjukkan adanya hubungan invers antara X_2 dan Y Sementara itu, variabel X_3 (partisipasi masyarakat) menunjukkan koefisien positif sebesar 0,338. Ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu unit partisipasi masyarakat akan menaikkan nilai Y sebesar 0,338, juga dengan asumsi variabel lainnya tetap Secara keseluruhan, model ini menjelaskan bahwa selain nilai dasar (konstanta), variabel yang berperan positif terhadap Y adalah peran perangkat desa (X_1) dan partisipasi masyarakat (X_3), sementara transparansi (X_2) justru memiliki dampak negatif. Peran positif X_1 dan X_3 mencerminkan bahwa peningkatan aktivitas perangkat desa dan keterlibatan masyarakat secara langsung terkait dengan peningkatan variabel Y, sedangkan transparansi menunjukkan korelasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut mengapa peningkatan tidak berbanding lurus

dengan hasil Y. Perlu pula diperhatikan validitas model, termasuk apakah koefisien tersebut signifikan secara statistik dan seberapa baik R^2 model menjelaskan variasi Y— karena interpretasi yang tepat bergantung pada kriteria ini

7. Hasil Pengujian Hipotesis

a. Hasil analisis koefisien determinasi

Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R	Std. Error of the Estimate
1	,728 ^a	,531	,505		3,41845

a. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X3), Peran Perangkat Desa (X1), Transparansi (X2)

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Berdasarkan hasil dari tabel 4.13, diketahui koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,505 atau 50,5% yang berarti seluruh variabel independen baik X_1 , X_2 , dan X_3 dapat menjelaskan variabel Y sebesar 50,5%, sementara itu selisihnya yakni 40,4% dipengaruhi oleh variabel lainya yang tidak menjadi fokus dalam penelitian ini

b. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji Parsial (Uji T) Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	16,076	3,116		5,159	,000
	Peran Perangkat Desa (X1)	,329	,105	,411	3,126	,003
	Transparansi (X2)	-,036	,156	-,042	-,231	,818
	Partisipasi Masyarakat (X3)	,338	,145	,419	2,333	,023

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Sebelum memaknai hasil uji t, terlebih dahulu dilakukan penentuan nilai **t-tabel** pada tingkat signifikansi 5% dan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1 = 60 - 3 - 1 = 56$. Berdasarkan rumus $\alpha/2$; $df \rightarrow 0,025$; 56, diperoleh t-tabel sebesar **2,00324**. Angka ini menjadi batas kritis untuk menilai signifikan atau tidaknya koefisien regresi pada pengujian parsial (uji t).

Dalam pengujian variabel Peran Perangkat Desa (X_1), diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,126, yang secara jelas lebih besar dari t-tabel ($3,126 > 2,003$). Selain itu, nilai signifikansi (p-value) tercatat 0,003, yang berada di bawah batas 0,05. Hal ini menegaskan bahwa secara parsial, peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima.

Sebaliknya, pada variabel Transparansi (X_2), nilai t-hitung yang diperoleh adalah -0,231, sedangkan t-tabelnya adalah 2,003. Karena nilai absolut t-hitung jauh lebih kecil ($|-0,231| < 2,003$), dan nilai signifikansi sebesar 0,818 jauh melebihi 0,05, maka transparansi tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial terhadap akuntabilitas. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) ditolak.

Terakhir, uji pada variabel Partisipasi Masyarakat (X3) menghasilkan t-hitung sebesar 2,333, yang melebihi batas kritis t-tabel 2,003 ($2,333 > 2,003$). Disertai nilai signifikansi yang rendah, yaitu 0,000 ($< 0,05$), menunjukkan bahwa secara parsial, partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H3) diterima.

Secara keseluruhan, uji t ini menunjukkan bahwa hanya dua variabel—Peran Perangkat Desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X3)—yang berpengaruh signifikan, sementara Transparansi (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, berdasarkan kriteria standar uji t baik dari nilai t-hitung maupun p-value.

c. Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	739,777	3	246,592	21,102	,000 ^b
	Residual	654,407	56	11,686		
	Total	1394,183	59			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

b. Predictors: (Constant), Partisipasi Masyarakat (X3), Peran Perangkat Desa (X1), Transparansi (X2)

Sumber : Data primer yang diolah, 2025

Untuk melaksanakan pengujian ini harus diketahui terlebih dahulu nilai F_{tabel} yang dirumuskan dengan $F = (k - 1; n - k)$ maka diperoleh hasil $F_{\text{tabel}} (2;60-3) = (2;57) = 3,15884$. Berdasarkan tabel 4.15 dapat diinterpretasikan hasil uji F, dimana nilai $F_{\text{hitung}} 21,102 > F_{\text{tabel}} 3,15884$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Peran Perangkat Desa (X_1), Transparansi (X_2), Partisipasi Masyarakat (X_3) secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada taraf signifikansi 5%.

Pembahasan

1. Pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

sejalan dengan hasil temuan (Nandea, 2019) dengan judul riset “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Demak)” menyatakan bahwa peran perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan nilai signifikansi sebesar $0,029 < 0,05$. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H_1) Diterima. Artinya terbukti perangkat desa berpartisipasi dalam semua tahap pengelolaan dana desa, sehingga menghasilkan pengelolaan dana desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Namun hasil riset ini bertentangan dengan riset yang dilakukan (Faizah, 2021) dengan judul “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Transparansi, Partisipasi, Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal)” menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas dana desa dengan nilai sig 0,108 lebih besar dari 0,05

2. Pengaruh Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Khasanah, 2020) dengan judul “Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Tanggung Jawab Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa” yang menyatakan bahwa tidak adanya transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa sehingga masyarakat tidak mengetahui pengalokasian APBDes. Transparansi bahkan tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan dan dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu hipotesis kedua (H_2) Ditolak. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antar pemerintah dengan masyarakat karena keterbukaan pemerintah desa atas apa yang dikelola dan diinformasikan kepada publik. Variabel transparansi dalam penelitian ini menjelaskan bahwa masih rendahnya keterbukaan pemerintah desa, hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan variabel yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun bertentangan dengan hasil riset (Faizah, 2021) dengan judul “Pengaruh Peran Perangkat Desa, Transparansi, Partisipasi, Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh peran perangkat desa terhadap akuntabilitas dana desa dengan nilai signifikansi $0,042 < 0,05$ yang dapat disimpulkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas dana desa

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

sejalan dengan riset yang dilakukan Masruhin Anam & Kaukab Elfan (2019) dengan judul riset “Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)”. Menyatakan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Maka dari itu hipotesis ketiga (H_3) Diterima. Partisipasi masyarakat menekankan pada mekanisme pengawasan dan pengendalian terkait penggunaan dana desa untuk memastikan bahwa pemerintah desa bertindak untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan akuntabilitas atas pengelolaan dana desa, maka masyarakat dalam kapasitasnya dapat memberikan masukan, dan turut serta mengawasi kinerja pemerintah desa.

Kesimpulan

Dengan berpedoman pada berbagai proses uji dalam penelitian ini dengan SPSS versi 25 untuk menganalisis data dan melihat pengaruh Peran Perangkat Desa, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe Kabupaten Pakpak Bharat). Ditinjau dari seluruh rangkaian penelitian mulai dari mengumpulkan, mengolah sampai dengan menginterpretasi data maka kesimpulan atas temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Perangkat Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, ditunjukkan pada nilai $3,126 > 2,003$ dengan sig $0,003 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Peran Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.
2. Transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, ditunjukkan pada nilai $-231 < 2,003$ dengan sig $0,818 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Transparansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas

Pengelolaan Dana Desa.

3. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, ditunjukkan pada nilai $2,333 > 2,003$ dengan $\text{sig } 0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Daftar Pustaka

- Akuntabilitas Dan Peran Pejabat Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes). *Jurnal Ekonomi*, 12(03), 1–13.
- AKUNTABILITAS DANA DESA (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal). 7(3), 6.
- Anam Masruhin, M. E. K. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Perangkat Desa di Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo). *Journal of Economic, Business and Engineering*, 1(1), 118–130.
- Arifa, I. N. (2019). Partisipasi Masyarakat dan Peran Pemerintah dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Dlingo. *Policy & Governance Review*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.30589/pgr.v3i2.129>.
- Budiarto, D. S., Setyaningrum, A. D., & Sari, R. P. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Faktor Anteseden yang Mempengaruhinya. *Wahana: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 23(2), 1–15. <https://doi.org/10.35591/wahana.v23i2.240>.
- Daud, R., Harun Blongkod, & Lukman Pakaya. (2024). Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 10(1), 70–77. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1754>.
- Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (A. Musfirah, A. Puspita, & Hasriani (eds.); 1st ed.).
- Faizah, D. N. (2021). *PENGARUH PERAN PERANGKAT DESA, TRANSPARANSI, PARTISIPASI, DAN KOMPETENSI TERHADAP*
- Guevarrato, G. (2022). *Mekanisme dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa* (S. Fitria (ed.)). WYP Indonesia. <https://policycommons.net/artifacts/2457316/mechanisme-dan-akuntabilitas-pengelolaan-alokasi-dana-desa-add-i/3479113/>.
- Hamsinar. (2017). *Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi* <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>.
- Hasibuan, Muhammad Rizal. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan Sosial (Social Disclosures) Dalam Laporan Tahunan Emitmen Di Bursa Efek Jakarta Dan Bursa Efek Surabaya*. Diss. program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2001.

- Ika Asmawati, & Prayitno Basuki. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1998). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 78. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>.
- Jurnal Akunida*, 4(2), 73–85. <https://doi.org/10.30997/jakd.v4i2.1558>.
- Khasanah, R. N. (2020). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi Dan Tanggung Jawab Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa. In *Jurnal Akuntansi Universitas Pancasakti*.
- Kholifah, N. N. (2020). *Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Kinerja Pemerintah Desa Sebagai Mediasi (Studi Kasus pada Perangkat Desa di Kecamatan Sumber dan Kecamatan Remba*. 1–281.
- Kisnawati, B., Astini, Y., & Oktaviani, R. N. (2018). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. *Jurnal Valid*, 15(1), 1– 10.
- Ma'mun, M. R. (2023). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Kompetensi Aparat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Kecamatan Brebes)*.
- Mukmin, M. N., & Maemunah, S. (2018). Pengelolaan Dana Pemerintah Desa.
- Nandea, F. A. (2019). *Pengaruh Peran Perangkat Desa, Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Demak)*. 118.
- Peraturan Bupati No 5 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, (2024). <https://jdih.pakpakbharatkab.go.id/dokumen/peraturan-bupati/5/2024>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 72 1 (2018). <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (pp. 1–16). (2014). <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, 68 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/113695/pmk-no-193pmk072018>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022, Pub. L. No. 231, 183 (2022). <https://jdih.kemenkeu.go.id/>.
- Pongatntung, P. C., Elim, I., & Mawikere, L. M. (2022). Pengaruh Peran Perangkat Desa Terhadap Kompetensi Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana (Studi Pada Desa di Kabupaten Kumelembuai). *Tinjauan Akuntansi AFEBI*, 7(1), 50–64.

- Pratolo, S., Yaya, R., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. LP3M Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <http://repository.umy.ac.id>.
- Prasetyo, Julius Andhika, et al. "Analisis Stabilitas Persediaan Pada Anggaran Produksi PT Unilever Tbk. Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 2.2 (2024): 19-27.
- Purba, N. H. (2021). *Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*.
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 27.
- Rahmayanti, A., & Chrystiana, E. T. (n.d.). Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Wironanggan, Gatak, Sukoharjo. *Journal of International Conference Proceedings*, 30–45.
- Rifandi, N., Rizka, K., Husni, B. M., Pitroh, I. E., Maulana, S., & Rohana, H. (2024). *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa* (M. Joni & Tuti Hardianti (Eds.)). Widina Media Utama.
- Riyadi, W., & Kurnadi, E. (2020). *Influence of Information Technology Utilization, Budgeting Participation and Supervision on Accountability of Village Fund Management in Sindang District of Majalengka Regency*. 3(2), 160–168. <http://jurnal.unma.ac.id/index.php/mr/index>.
- Setiana, N. D. (2017). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal Periode Tahun 2016*. 1–8.
- Setiana, N. D., & Yuliani, N. L. (2017). Pengaruh Pemahaman dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *University Research Colloquium*.
- Setiyaningrum, I. (2017). Pengaruh akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta Budgeting Performance Of Value For Money Concept At. *Jurnal Profita*, 000(3), 1–20.
- Siagian, V., Rahmadana, M.F., Basmar, E., Purba, P.B., Nainggolan, L.E., Nugraha, N.A., Siregar, R.T., Lifchatullaillah, E., Marit, E.L., Simarmata, H.M.P. and Prasetya, A.B., 2020. *Ekonomi dan bisnis Indonesia*.
- Sugiyono. (2018). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Susanti, F., Ernitawati, Y., & Roni, R. (2023). Analisis Transparansi,
- Tahun. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015*. 1223.
- Umaira, S., & Adnan. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 1–11. <https://doi.org/10.37478/jria.v4i2.3908>.
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 105–112. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.13112>.
- Yuesti, A. (2023). *Akuntansi Dana Desa* (1st ed.). Zifatama Jawa.

Yuningtyas, K. (2021). Pengaruh Peran Perangkat Desa, Transparansi, dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa(Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Klaten Selatan). *Universitas Widya Dharma*, 2021, 2–29